

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN DRAINASE LINGKUNGAN USU ANTARA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DENGAN CV. DINA UTAMA

(Studi Kasus : Surat Perjanjian No: 30/UN5.1.8/PSS/SPMK/DRA/APBN/2013)

OLEH

JOKO WIBOWO

NPM : 11.840.0157

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Universitas Sumatera Utara (USU) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Kota Medan bila dimusim hujan sering terjadi banjir atau genangan air sampai ke badan jalan. Hal ini membuat tidak nyamannya kegiatan pembelajaran akademik di Kampus USU tersebut. Mengingat begitu banyaknya hambatan yang ditimbulkan oleh banjir, maka perlu direncanakan dengan cermat mengenai penanggulangan banjir tersebut, perlu diimbangi dengan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang fisik. Salah satu bentuk realisasi adalah pemeliharaan saluran drainase lingkungan USU. Pemeliharaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak perjanjian yang dibuat oleh USU dengan pihak swasta sebagai pemborong pekerjaan, dimana perjanjian yang diadakan ini merupakan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian yang dilakukan oleh USU dengan pihak swasta adalah merupakan perjanjian pengadaan barang/jasa. Namun, dalam hal ini penulis mengkaji perjanjian pengadaan barang/jasa mengenai konstruksi perjanjian ini umumnya disebut dengan perjanjian pemborongan. Dengan melalui metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang meneliti bahan sekunder dengan menggunakan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian yang diadakan suatu pemerintahan dan perusahaan rekanaan sesuai dan mengikuti prosedur dalam peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi acuan dalam mengkaji permasalahan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Lalu, tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan mereka yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dan bagaimana penyelesaian jika terdapat suatu perselisihan dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah para pihak mengikuti prosedur dan mematuhi peraturan yang mengatur perjanjian ini dan melakukan pekerjaan dan tanggungjawab sesuai dengan isi dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak juga dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian para pihak tidak langsung melapor ke pengadilan, namun memakai cara musyawarah dan juga menetapkan lembaga penyelesaian persengketaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemutus sengketa.

Kata kunci : drainase, perjanjian pemborongan

## ABSTRACT

University of Sumatera Utara (USU) is a State Universities located in Medan when the rainy season frequent flooding or waterlogging to the road. This makes uncomfortable academic learning activities in the USU campus. Given the many obstacles posed by floods, it needs to be planned carefully about the flood prevention, needs to be balanced with the maintenance of facilities and infrastructure in the physical plane. One form is the realization of the maintenance of drainage channels USU environment. Maintenance is carried out based on the contract agreement made by USU with the private sector as contractor work, which was held this agreement is a written agreement agreed to by both parties. USU agreement made by the private sector is an agreement procurement of goods / services. However, in this case the authors examine the procurement agreement regarding the construction of this agreement is generally called the chartering agreement. With over normative legal research methods (normative) which examined secondary materials using normative approach that is intended to obtain data and information from primary legal materials, secondary and tertiary.

In writing this paper the author examines how the implementation of the agreement and the company held a government rekanaan adhere to the following procedures in the regulations. Regulation is the reference in studying this problem is the Presidential Regulation No. 70 Year 2012. Then, responsibilities undertaken by both parties in accordance with the implementation of their work as agreed in the agreement and how the settlement if there is a dispute in the process of implementation of the agreement.

Conclusions obtained by the author is the party to follow the procedures and abide by the rules that govern this Agreement and perform the work and responsibilities in accordance with the contents of the contract agreed upon by the parties are also in dispute resolution in the parties' agreement did not directly report to the court, however, used the method of deliberation and also establish dispute resolution institutions Indonesian National Board of Arbitration (BANI) as resolving the dispute.